

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya ada saja pihak-pihak yang mencari dan mengambil keuntungan dibalik itu semua untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kelompok. Pengambilan keuntungan ini sering dikaitkan dengan korupsi. Indonesia adalah satu negara yang masih menghadapi masalah korupsi yang sudah mengakar sejak lama. Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi 2014, ternyata negara yang paling bersih adalah Denmark dan sementara Indonesia negara yang berada peringkat 107 dari seluruh negara di dunia ([news.liputan6.com](http://news.liputan6.com)).

Korupsi saat ini dilakukan bukan lagi oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan atau dengan kata lain dilakukan juga oleh pihak-pihak yang memiliki intelektual yang tinggi. Dan itu terbukti dengan terjadinya masalah mengenai korupsi peralatan farmasi di Universitas Sumatera Utara (USU) dalam pengadaan alat-alat farmasi pada Fakultas Farmasi USU Tahun anggaran pendidikan tinggi (dikti) 2010. Menyelidiki hal tersebut, penyidik menduga adanya penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tak sesuai ketentuan, dengan menggelembungkan harga. Dan juga diduga mengatur pemenang tender proyek tersebut (PT Anak Negeri milik M. Nazaruddin) bersama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

serta penerimaan beberapa barang pengadaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Diduga kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek tersebut mencapai Rp 14,4 miliar dengan rincian 7,116 miliar dari penggelembungan harga, dan Rp 7,308 miliar dari pengadaan peralatan farmasi (sp.beritasatu.com).

Sama halnya dengan USU, Universitas Indonesia (UI) yang juga terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan Informasi Teknologi (IT) di Perpustakaan UI. Berdasarkan pemaparan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp 13.076.468.264. Terungkapnya kasus ini bermula dari adanya laporan civitas akademika yang tergabung dalam 'Save UI' dan berdasarkan audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena sudah diketahui bahwa akhir tahun 2011, civitas akademika UI yang tergabung dalam SAVE UI mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di UI dan mendesak supaya KPK melakukan pemeriksaan di Universitas di Depok ini, terkait banyaknya proyek yang diketahui bermasalah (sp.beritasatu.com).

Semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi di ruang lingkup entitas universitas atau perguruan tinggi, telah mencederai citra sebagai lembaga pendidikan di Indonesia dan kasus korupsi telah merugikan keuangan negara. Tindakan korupsi saat ini merupakan kecurangan akuntansi yang menjadi fenomena umum dikalangan civitas akademika.

Kecenderungan kecurangan akuntansi ini telah menarik banyak perhatian masyarakat dunia, karena kecurangan akuntansi ini menimbulkan salah saji atau penghilangan secara sengaja dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut akan berdampak negatif terhadap keputusan yang akan diambil oleh pengambil keputusan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Karena disaat memegang suatu wewenang, akan memiliki peluang yang lebih untuk memanfaatkan berbagai macam kelemahan yang ada, seperti memanfaatkan kelemahan di sistem pengendalian internal.

Berdasarkan temuan pemeriksaan BPK menemukan 14.854 kasus senilai Rp30,87 triliun selama pemeriksaan di semester I Tahun 2014. Dengan rincian 8.323 kasus senilai Rp30,87 triliun merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan 6.531 kasus merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Internal ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Sistem pengendalian internal dibuat untuk memberikan kepastian yang layak dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu juga, sistem pengendalian internal memiliki peran yang cukup besar dalam suatu organisasi, karena dengan adanya pengendalian internal dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Menurut Wilopo (2006) penanganan kecenderungan kecurangan akuntansi diperlukan *monitoring*, untuk mendapatkan hasil *monitoring* yang baik diperlukannya pengendalian internal yang efektif.

Selain sistem pengendalian internal, seharusnya perusahaan atau organisasi pada saat penyusunan sampai mengeluarkan laporan keuangannya menaati berbagai aturan akuntansi. Dengan adanya aturan akuntansi akan menghindari

tindakan yang dapat merugikan pihak tertentu dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Karena dalam penyusunan laporan keuangan ada potensi konflik kepentingan yang selalu ada antara *agent* dan *principle*. Dengan demikian perlunya aturan akuntansi yang memberikan suatu pedoman atau norma bagi manajemen untuk melakukan aktivitas atau kegiatan akuntansi dengan baik dan benar yang nantinya akan menciptakan laporan keuangan yang memiliki informasi yang handal serta berkredibilitas tinggi. Menurut IAI (2002) dalam Adelin dan Eka (2013) menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi, untuk mendapatkan kredibilitas informasi tersebut manajemen harus melaksanakan aturan akuntansi yang berlaku.

Keberadaan sistem pengendalian internal dan ketaata aturan akuntansi yang telah diuraikan sebelumnya sangat dibutuhkan, namun harus dicermati bahwa budaya organisasi juga ikut memiliki peran dalam terjadinya tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Karena budaya organisasi akan membuat karakter, pola berpikir, berperilaku serta bersikap dari seseorang karyawan atau pegawai untuk sesuai dengan nilai-nilai yang dianut didalam organisasi. Pristiyanti (2012) berasumsi bahwa budaya etis organisasi yang buruk akan mempengaruhi karyawan dalam melakukan tindakan kecurangan, jadi semakin baik budaya etis organisasi dalam suatu pemerintahan maka akan, semakin rendah terjadinya *fraud*. Budaya organisasi yang diharapkan yakni budaya organisasi yang etis yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi tersebut.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kecurangan merupakan kesalahan yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pribadi

atau kelompok, dan cenderung menyimpang dari prosedur akuntansi atau yang lebih dikenal dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika berbicara mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi tidak akan terlapas dari laporan keuangan, karena laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan publik serta tidak hanya untuk mencari keuntungan perusahaan atau organisasi saja.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan lembaga pelayanan publik dalam bidang jasa pendidikan yang tidak mencari keuntungan namun, memenuhi kebutuhan publik dalam bidang pendidikan serta melahirkan generasi-generasi muda yang mampu bersaing dan menghadapi permasalahan di masa yang akan datang. Selain melahirkan generasi-generasi muda, PTN sebagai lembaga publik diharapkan memiliki ciri dan komunitas yang berbeda dengan lembaga layanan publik lainnya dan terpelihara dari kecenderungan kecurangan akuntansi (Toenlice, 2007 dalam Thoyibatun, 2008).

Dengan demikian, kecenderungan kecurangan akuntansi pada PTN tidak seharusnya terjadi. Berdasarkan pemaparan dari beberapa masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik dan bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, berikut identifikasi masalah yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dalam penelitian ini:

1. Terdapat kepentingan untuk memperkaya golongannya
2. Dengan lemahnya sistem pengendalian internal, banyak pegawai yang cenderung menyalahgunakan kepercayaan untuk melakukan kecurangan
3. Laporan keuangan yang disusun dan dikeluarkan akan menyesatkan, jika tidak menaati aturan akuntansi.
4. Dengan adanya budaya organisasi yang tidak etis dianggap memberikan pengaruh buruk pada karyawan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya pada sistem pengendalian internal yang digunakan pada organisasi, ketaatan dalam melaksanakan aturan akuntansi, dan budaya organisasi yang diterapkan didalam ruang lingkup organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini dilakukan hanya pada pegawai atau karyawan yang bekerja di Biro Perencanaan dan Keuangan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dalam penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-variabel sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
  - b. Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka memperoleh kecenderungan kecurangan akuntansi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif untuk pengembangan para pegawai di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya di biro perencanaan dan keuangan untuk tidak melakukan tindakan kecurangan akuntansi